

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

KECAMATAN TANGSE



RENJA KECAMATAN TANGSE

TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE KECAMATAN TANGSE

Alamat : Jln. Tangse – Geumpang

Kode Pos 24166

KEPUTUSAN CAMAT TANGSE NOMOR : 04 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN TANGSE TAHUN 2024

BISMILLAAHIRRAHMAANIRAAHIM,

CAMAT KECAMATAN TANGSE

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional mewajibkan setiap organisasi perangkat daerah untuk menyusun rencana kerja (RENJA) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan RENJA Kecamatan Tangse 2024 perlu dibentuk tim penyusun rencana kerja (RENJA) Kecamatan Tangse Tahun 2024.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut, perlu menetapkan keputusan camat tentang pembentukan tim penyusunan rencana kerja (RENJA) Kecamatan Tangse tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008, tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
3. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017, tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
5. Peraturan Gubernur Aceh nomor 16 tahun 2018, tentang rencana pembangunan jangka menengah aceh (RPJMA) tahun 2017-2023;
6. Qanun Kabupaten Pidie nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Pidie.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : -

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tangse Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBK) Kabupaten Pidie Tahun anggaran 2024;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : TANGSE
PADA TANGGAL : 06 Maret 2023 M
13 Syakban 1444 H

**CAMAT TANGSE**
ABDUL JAFAR, S.Pd, M.Pd
Pembina / Nip.19731231 200604 1 005

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT TANGSE
NOMOR : **04** TAHUN 2023
TANGGAL : 06 Maret 2023 M
13 Syakban 1444 H

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN TANGSE
TAHUN 2024**

No.	NAMA	JABATAN ORGANISASI
1.	Abdul Jafar,S.Pd,M.Pd	CAMAT
2.	Imran,ST	SEKCAM
3.	Nurhayati	KASUBBAG KEUANGAN
4.	Irwansyah	PEMBANTU BENDAHARA
5.	Misriah	BENDAHARA

**CAMAT TANGSE**
ABDUL JAFAR,S.Pd,M.Pd
Pembina / Nip.19731231 200604 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum 3

 1.3. Maksud dan Tujuan..... 6

 1.4. Sistematika Penulisan 7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPK..... 8

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tangse 8

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tangse 10

 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah ... 11

 2.4 Review Terhadap Rancangan 12

 2.5. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan SKPK 12

 2.6. Formulasi isu-isu penting berupa Rekomendasi dan Catatan yang Strategis
 untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun
 yang direncanakan. 12

 2.7. Penelaah Usulan Program dan kegiatan masyarakat 13

BAB III TUJUAN DAN SARAN PERANGKAT DAERAH..... 14

 3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional/Provinsi/Kabupaten 14

 3.2 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah 16

 3.3. Program dan Kegiatan Prioritas..... 17

 3.3. Usulan Musrembang Sudah Masuk Kedalam Rencana Kerja..... 19

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 19

 4.1 Uraian sumber-sumber Pendanaan Program dan Kegiatan Daerah 19

BAB V PENUTUP..... 20

 5.1 Catatan Penting dan Kaidah Pelaksanaan 20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain. RENJA SKPD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pada SKPD dalam rangka pembangunan tidak dapat dipisahkan dari aktifitas perencanaan. Dalam hal sistim pembangunan, perencanaan merupakan bagian terpenting dalam penentuan arah, bentuk, pembiayaan, kebijakan serta prioritas pembangunan. Sebagai satu kesatuan, perencanaan dan pembangunan harus dilaksanakan secara konperensif, akuntabel, transparan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan konsepsi ekonomis, efesien dan efektif.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan merupakan suatu keniscayaan yang tidak terbantahkan baik berdasarkan keruangan maupun berdasarkan waktu pelaksanaannya. Yang dimaksud dengan perencanaan yang didasarkan ruang adalah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dari ditingkat Gampong, Kecamatan, Kabupaten hingga Pusat. Sementara berdasarkan waktu pelaksanaan dikenal dengan Perencanaan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RJPM/ Renja SKPK dan jangka pendek (RJPD). Renja SKPK/ Renja/ RKPD sebagai penjabaran yang digunakan pemerintah daerah untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan Kabupaten (APBK).

RENJA SKPD Kecamatan Tangse Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan pada Kecamatan Tangse, dan pelaksana tugas pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan pemerintah Daerah yang dicapai pada masa 1 (satu) tahun.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara perencanaan daerah dengan perencanaan kecamatan, maka perencanaan tujuan kecamatan mendukung perencanaan pembangunan daerah sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai pemerintah kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Program dan Kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Tangse untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2024 . Tangse adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Kawasan Tangse ini yang luas wilayahnya 750 km² yang terdiri 28 desa, 4 Kemukiman ini dihuni oleh sekitar 27.952 jiwa, laki-laki 13.721 jiwa dan perempuan 14.231 jiwa (data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie tahun 2020). Batas Kecamatan Tangse berbatasan dengan sebelah utara Kecamatan Keumala/ Kecamatan Tiro, sebelah Selatan berbatasan dengan Aceh Barat, sebelah Barat berbatasan dengan Aceh Besar, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mane. Kota Tangse (Ibu Kota Kecamatan) berada pada ketinggian 600-1200 m. Iklim yang sejuk dengan curah hujan yang tinggi menjadikan kawasan ini subur untuk berbagai komoditas pertanian. Tangse dan kawasan sekitarnya juga memiliki hasil tambang seperti emas, bijih besi dan lain-lain. Bahkan di era 70-an wilayah ini merupakan daerah paling makmur di Aceh, dengan kopi robusta, padi (beras tangse) yang sangat legit, durian yang manis, dan hortikultura lainnya.

Adapun keberhasilan dan tidaknya RENJA SKPD ini tidak lepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Sasaran pokok arah kebijakan RPJMD Kabupaten Pidie menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Kecamatan Tangse, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Berdasarkan hal tersebut masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja Kecamatan Tangse dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Tangse.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Renja SKPD perlu mengembangkan hubungan (link) di antara peraturan dan perundangan tersebut sehingga Renja SKPD sebagai dokumen rencana tahunan mudah diterjemahkan ke dalam KUA APBD, RKA-SKPD, dan APBD.

Adapun landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tangse dan kebudayaan Kabupaten Pidie 2023 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Nomor 104 Tahun 2004).
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 nomor 126; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438).
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 463).
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang- undang Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Republik Indonesia Nomor 5063).
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Teknis Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klarifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
24. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
25. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 tahun 2015 tentang rencana induk Pemanfaatan dana otonomi Khusus Aceh Tahun 2008-2027;
26. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Aceh;

27. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017-2024 ;
28. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusun Renja Sekretariat Kecamatan Tangse untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat Program dan Kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Kantor Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya selama tahun 2024 .

Adapun Tujuan penyusunan Renja SKPD adalah:

1. Memberikan acuan bagi Kecamatan Tangse dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
2. Memberikan acuan bagi Kecamatan Tangse dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
3. Memberikan acuan bagi Kecamatan Tangse dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
4. Memberikan acuan bagi Kecamatan Tangse dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
5. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana.
6. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program /kegiatan selama 1 tahun oleh SKPD.
7. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta

dapat mengambil langkah – langkah atau kebijakan tugas -tugas sesuai dengan kewenangannya.

8. Tersedianya suatu dokumen perencanaan strategis dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan masalah Kecamatan Tangse.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tangse Tahun 2024 disusun secara sistematis terdiri dari 5 bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Pendahuluan
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematis Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Camat Kecamatan Tangse tahun Lalu dan Capaian Kinerja Resntra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Camat Kecamatan Tangse
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal
- 2.5. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan SKPD Tantangan dalam Peningkatan Pelayanan, antara lain :
- 2.6. Formulasi isu-isu penting berupa Rekomendasi dan Catatan yang Strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.7. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPK Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie
- 3.3 Program dan Kegiatan Prioritas
- 3.4 Penyelarasan Program dan Kegiatan Dengan Usulan Musrenbang
- 3.5 Pendanaan Program dan Kegiatan Prioritas Berdasarkan Pagu Indikatif Dengan Perkiraan Maju

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPK TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Camat Kecamatan Tangse tahun Lalu dan Capaian Kinerja Resntra

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bandung khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Kinerja Kantor Kecamatan Tangse tahun 2023 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan Kegiatan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2023, pelaksanaan kinerja Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Peningkatan Pelayanan umum
6. Program Peningkatan Peran Perempuan di pedesaan
7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
8. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa

Secara keseluruhan Kinerja sasaran ini memenuhi/mencapai target dari 8 (delapan) program dan 19 (sembilan belas) kegiatan dengan persentase realisasi program/kegiatan 98.98 %, dapat dilihat pada lampiran daftar tabel 1.1.

Adapun Pencapaian kegiatan yang ada, dari kegiatan tersebut telah membuahkan hasil yaitu terlaksananya kegiatan perayaan hari – hari besar keagamaan dan adat istiadat dengan capaian kinerja 100%. Program peningkatan pelayanan umum dengan kegiatan utama Musrenbang Kecamatan dengan tingkat capaian kinerja 100% dan hasil yang dicapai adalah terarahnya perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan. Sedangkan di bidang pemerintahan kecamatan

terlaksana sesuai dengan yang diharapkan yakni terlayani masyarakat Gampong dari berbagai tugas dan fungsi yang ada.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Camat Kecamatan Tangse

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan dengan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2007, serta Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan Kinerja Pelayanan. Berbagai persoalan seperti rendahnya partisipasi musyawarah pembangunan yang disebabkan rendahnya serapan usulan pendanaan, kualitas dokumen yang masih kurang bahkan tidak ada. Hasil pengukuran kinerja kegiatan kinerja indikator sistem pelayanan maksimal (SPM) sebagaimana terlihat pada tabel 2.2 (terlampir).

Kecamatan tangse sebagai salah satu perangkat daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis

dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Tingkat Kinerja Pelayanan SKPD dan hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan SKPD

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya Perangkat Daerah Kecamatan berpedoman sesuai dengan Peraturan- peraturan Bupati Pidie. Adapun Tugas Pokok Camat sebagai berikut :

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
- Mengordinasikan upaya peningkatan kebersihan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- Mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa / gampong
- Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan
- Mengordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum,

Adapun fungsi Camat sebagai berikut :

- Penyelenggaraan tugas-tugas umum Pemerintahan di kecamatan dan pembinaan gampong
- Pembinaan kebersihan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
- Pembinaan pemberdayaan masyarakat
- Pembinaan kesejahteraan rakyat
- Pembinaan pelayanan umum dan
- Penyusunan rencana dan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga

2. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi SKPD

Permasalahan Utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, adalah sarana prasarana yang belum memadai, tingkat profesionalitas aparat pelaksana dan masih rendahnya peningkatan kualitas sumber daya aparatur, serta masih minimnya anggaran belanja langsung.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie, Tabel 2.2 Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2024 terlampir.

2.5. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan SKPD Tantangan dalam Peningkatan Pelayanan, antara lain :

- 1) Masih rendahnya anggaran belanja langsung SKPK.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah di Kantor Camat Kecamatan Tangse
- 3) Perlunya Renofasi Gedung Kantor, sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam pelaksanaan kegiatan.

2.6. Formulasi isu-isu penting berupa Rekomendasi dan Catatan yang Strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Kantor Camat Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie diharapkan responsif, kreatif, inovatif, agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan yang berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif yang diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan yang inovatif melalui peningkatan kapasitas aparatur, keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan dan komitmen melaksanakan bersama perencanaan yang telah ada . Untuk mewujudkan harapan diatas beberapa kondisi yang harus dipersiapkan antara lain sebagai berikut:

- 1) Perlunya anggaran pada SKPD yag memadai dalam menunjang pelaksanaan kegiatan
- 2) Perlu adanya renovasi gedung serta sarana dan prasarana kantor dikarenakan kondisi gedung kantor berupa bangunan lama.

- 3) Adanya pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur baik di Kantor Camat dan aparatur pemerintah gampong (perangkat gampong)
- 4) Untuk menginsentifkan penerimaan pendapatan daerah sektor pajak (PBB) perlu perubahan nama kepemilikan tanah maupun bangunan karena nama kepemilikan tanah belum ada perubahan walaupun tanah maupun bangunan tersebut sudah beralih tangan beberapa kali, tujuan tersebut yakni guna melayani identitas tanah/bangunan dari masyarakat dengan data terbaru.

2.7. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

1. Dalam Penyusunan Rencana Kerja SKPD (RENJA SKPD) Sekretariat Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie 2024 , disamping berpedoman pada Rencana Strategis SKPD (RENSTRA SKPD) Sekretariat Kecamatan Tangse Tahun 2024 , juga mengakomodasi usulan masyarakat Desa atau Gampong yang di hasilkan melalui program pelayanan umum yakni Musrenbang Kecamatan untuk kegiatan pada tahun 2024 .
2. Bahwa usulan program/kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan/usulan dari tingkat gampong yang selanjutnya dijadikan skala prioritas usulan musrenbangdes yang perlu dikawal/dibahas ditingkat forum Musrenbang tingkat kecamatan.
3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu-isu penting dari masing-masing SKPK yang ada pada unit pelaksana teknis di tingkat kecamatan.

BAB III

TUJUAN DAN SARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala - kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *Good Governance* dan *Akuntabilitas Public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Tangse dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas - tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Gampong.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi Aspek Perizinan, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Fasilitas, Penetapan, Penyelenggaraan, dan Kewenangan lain yang dilimpahkan. Telaah terhadap kebijakan Kabupaten Pidie, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pidie , dimana secara teknokratis Prioritas Kabupaten Pidie telah mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan provinsi Aceh Sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun 2020 - 2023 dan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta Program Bupati, dimana RPJMD juga sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Pidie.

SKPK Kecamatan Tangse melaksanakan strategis dan kebijakan nasional sebagaimana yang tersebut dalam RPJMD yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan daya saing perekonomian daerah. Untuk hal itu SKPK Kecamatan Tangse memperkuat pencapaian kebijakan dengan melakukan program dan kegiatan yang mendukung Visi dan Misi pembangunan secara menyeluruh dan pada setiap aspek.

Sasaran strategis dari tujuan pertama : Terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah:

Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antar perencanaan, penganggaran, dan pengawasan yang diukur dari indikator:

- a) RPJMD Pemerintah Kabupaten Pidie dan RKP tahun 2020 sampai dengan 2023 memiliki tujuan, target dan sasaran yang jelas dan terukur serta sesuai dengan RKP.
- b) Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan Stakeholders terhadap RPJMD, yang diukur dari :
 1. Pendapat stakeholders tentang proses penyusunan RPJM.
 2. Pendapat stakeholders tentang dokumen RPJM yang telah ditetapkan
- c) Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan stakeholders terhadap RKP diukur dari:
 1. Pendapat stakeholders tentang proses penyusunan RKP.
 2. Pendapat stakeholders tentang RKP yang telah ditetapkan

Sedangkan strategis yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sektoral, lintas sektoral dan wilayah dan antara pusat dan daerah ,serta keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan , penganggaran, pengawasan, dan pelaksanaan.
2. Meningkatkan kualitas pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.
3. Meningkatkan kualitas evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.
4. Meningkatkan kualitas kajian dan atau evaluasi kebijakan pembangunan.
5. Meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan pembangunan Internal.

6. Membangun manajemen kinerja dari kinerja lembaga hingga kinerja individu/ pegawai.
7. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja pegawai.
8. Meningkatkan kemampuan aparat dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan melalui sosialisasi atau bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPK Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie

Tujuan dan Sasaran Sekretariat Kecamatan Tangse tidak terlepas dari tujuan dan sasaran Kabupaten Pidie pada periode kedepan, berangkat dari tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatkan penyerapan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan meningkatkan partisipasi semua pihak dalam perencanaan pembangunan.
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur perencana dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan.
3. Mengembangkan dan memantapkan sistem koordinasi dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.
4. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran.
5. Mengembangkan system dan meknisme pengumpulan dan pengolahan data yang lengkap dan akurat sebagai bahan perencanaan pembangunan.
6. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sistem pelaporan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang dirumuskan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka lima tahun kedepan adapun yang menjadi sasaran Sekretariat Kecamatan Tangse:

1. Terserap aspirasi masyarakat dalam prosentase yang meningkat dalam pelaksanaan rill dan terlaksananya perencanaan yang mengedepankan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan.
2. Terwujud aparatur perencanaan pembangunan yang profisional dalam penyusunan produk– produk perencanaan pembangunan.
3. Terwujud perencanaan pembangunan yang terukur, berkualitas dan berkesinambungan.
4. Terwujudnya pengembangan sistem dan mekanisme pengumpulan dan pengolahan data yang lengkap dan akurat sebagai bahan perencanaan pembangunan.

5. Terwujudnya pengembangan dan pematapan system kordinasi perencanaan pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Kabupten yang dinamis responsif.
6. Tersedianya produk perencanaan pembangunan dan penganggaran sesuai kebutuhan.
7. Terlaksananya sistem pelaporan sesuai kebutuhan dan target waktu yang tepat. Secara lebih rinci keterkaitan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Sekretariat Kecamatan Tangse.

3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedang program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistimatik dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakna SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang ada dan tercapainya target yang telah ditetapkan dengan terlayannya masyarakat dari berbagai tugas dan fungsi yang ada.

Pada Tahun 2024 Sekretariat Kecamatan Tangse merencanakan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 2.740.493.394,- yang dialokasikan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.403.964.875,- dan belanja langsung sebesar Rp. 336.528.519,- untuk pelaksanaan 5 (Lima) program dan 20 (dua puluh) kegiatan.

Adapun tujuan Program dan Kegiatan Prioritas Kecamatan Tangse adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Meningkatkan Sumberdaya Manusia yang Berakhlakul Karimah
3. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
4. Peningkatan Infrastruktur Terintegrasi

Sasaran dari Program dan Kegiatan Prioritas Sekretariat Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Umum/ Pelayanan Kepada Masyarakat
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran dari Program dan Kegiatan Prioritas Kecamatan Mutiara Timur akan dicapai selanjutnya menetapkan cara untuk mencapainya melalui tahapan dan kegiatan sebagai berikut :

- ✓ Menetapkan kebijakan yang merupakan aspek legal dari kegiatan yang akan dilaksanakan.
- ✓ Menyusun program strategis yang mendukung pencapaian Visi dan Misi.
- ✓ Menyusun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.4 Penyeragaman Program dan Kegiatan Dengan Usulan Musrenbang

Program dan kegiatan dari Sekretariat Kecamatan Tangse untuk tahun 2024 sangat disesuaikan dengan usulan-usulan yang masuk melalui musrenbang Kecamatan

Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalan gagasan dari tingkat Dusun/ Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes. pada form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/ Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu - isu penting dari masing-masing Gampong yang ada dan akan dibahas Pada Musrenbang Tingkat Kabupaten nantinya.

3.5 Pendanaan Program dan Kegiatan Prioritas Berdasarkan Pagu Indikatif Dengan Perkiraan Maju

Pendanaan Program Prioritas perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tangse Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan program/kegiatan Prioritas Kecamatan Tangse Tahun 2024

BAB IV

RENCANA KERJA PENDANAAN

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Bagi Kecamatan Tangse, Renja Tahun 2024 ini akan ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran yang menjadi bahan dalam penyusunan APBD Tahun 2024 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran yang dialokasikan untuk Kecamatan Tangse.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam Renja Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie Tahun 2024 ini mengedepankan manfaat maksimal yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas terutama terkait fungsi Kecamatan Tangse selaku penanggungjawab di kabupaten Pidie.

Pelaksanaan kegiatan Renja Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie Tahun 2024 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar bidang, antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip safe guarding akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program.

BAB V

PENUTUP

4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tangse Tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Pidie. Selain itu RENJA juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi dinas/badan/lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek. RENJA sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam RENJA Kecamatan Tangse Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan professional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA), di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. RENJA Kecamatan Tangse tahun 2024 , harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

3. Penyusunan Renja Awal Kecamatan Tangse Tahun 2024 masih belum sempurna, karena pemahaman tentang aturan dan tata cara penyusunan Renja masih belum begitu dipahami.
4. Rencana Kerja Kecamatan Tangse Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBK Kabupaten Pidie, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.
5. Rencana Kerja (RENJA) SKPD, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Pidie dan Renstra Dinas).
6. RENJA Kecamatan Tangse Tahun 2024 , harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

Demikian penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tangse Tahun 2024 ini dapat Kami sampaikan, mudah-mudahan dapat dijadikan bahan seperlunya.

Tangse, 14 Maret 2023

CAMAT TANGSE,



ABDUL JAFAR.S.Pd.M.Pd

Pembina NIP.19731231 200604 1 005

Tabel. 2.1
PROGRAM KEGIATAN PERENCANAAN DAN PENGANGARAN 2024

No	Program	Kegiatan	Target Capaian	Persentase capaian
1	2	3	4	5
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah -Administrasi Keuangan Perangkat Daerah -Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah -Administrasi Umum Perangkat Daerah -Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah -Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan 31 Org/Bln 3 Orang 5 Laporan 3 Laporan 4 Unit	2 Laporan 31 Org/Bln 3 Orang 5 Laporan 3 Laporan 4 Unit
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-pemelihaKoordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan -Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	1 Laporan 7 Urusan	1 Laporan 7 Urusan
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	1 Laporan
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Laporan	1 Laporan
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28 Desa	28 Desa

CAMAT TANGSE,

ABDUL JAFAR.S.Pd.M.Pd
 Pembina Tk.I/NIP.19731231 200604 1 005

Tabel 2.2
CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Jumlah Dana
1	2	3	4
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	RP. 9.000.000-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31 Org/Blh	RP. 2.403.964.875-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Orang	Rp. 16.293.302-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Laporan	Rp. 75.103.888-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	Rp. 96.431.227-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Unit	Rp. 50.000.000-
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	Rp. 4.000.000-
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	7 Urusan	Rp. 34.299.000-
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	RP. 2.523.500-
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Laporan	Rp. 5.000.000-

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28 Desa	Rp. 19.153.442-



CAMAT TANGSE,

ABDUL JAEFAR.S.Pd.M.Pd

Pembina Tk.I/NIP.19731231 200604 1 005

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT serta atas segala limpahan Rahmat Taufik dan Inayahnya, Alhamdulillah kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Kecamatan Tangse Tahun 2024 . Laporan ini disusun sebagai program kerja SKPK Kecamatan Tangse dalam kurun waktu tahun 2024 .

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie tahun 2024 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pidie . Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tangse tahun 2021 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Tangse, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Tangse tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Tangse.

Akhir kata dengan telah tersusunnya Rencana Kerja tahun 2024 ini, kepada semua pihak kami ucapkan terima kasih atas bantuan dan partisipasinya, semoga ALLAH SWT memberikan balasan yang berlipat ganda dan semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua, aamiin.

Tangse, 14 Maret 2023

CAMAT TANGSE,



ABDUL JAFAR.S.Pd.M.Pd

Pembina NIP.19731231 200604 1 005

Rekapitulasi Rencana Prioritas 2024					MUSRENBANG KEC: TANGSE					A		
No	Kegiatan	Lokasi/Desa	Volume	Satuan	Pagu	Kewenangan			Alasan Penganggaran	Pantau		
						Prov	Kab	Desa		AK	Ab	Ap
	Jumlah				0		✓			✓		
1	Pembangunan Jembatan Rangka Baja Geunie	Lhok Keutapang	1	Unit	Rp 2,000,000,000.00		✓		Pembangunan Jembatan Rangka Baja di Dusun Geunie Gampong Lhok Keutapang merupakan Prioritas masyarakat Dusun Geunie untuk menyebrangi sungai agar sampai ke rumah warga, Jembatan yang saat ini hanya bisa dilalui oleh sepeda motor. jembatan ini juga merupakan akses menuju tempat wisata air terjun yang ada di Lhok Keutapang.	✓		
2	Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan Gle Meurak	Blang Teungoh	4000	Km	Rp 800,000,000.00		✓		Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan Gle Meurak perlu dilakukan agar masyarakat lebih mudah mengakses ke kebun dan juga untuk menghindari tidak bisa dilewati ketika musim hujan karena permukaan jalan masih tanah dan licin.	✓		
3	Rehabilitasi Pustu Blang Malo	Blang Malo	1	Unit	Rp 300,000,000.00		✓		Kondisi Puskesmas Pembantu (Pustu) sudah sangat diperlukan rehabilitasi karena belum pernah dilakukan rehab selama setelah dilakukannya pembangunan pertama sampai dengan sekarang, sehingga harus di rehab guna untuk kenyamanan pasien dan kesempurnaan pelayanan.	✓		
4	Jembatan Beton Blang Dhot-Blang Bungong	Blang Dhot	1	Unit	Rp 1,400,000,000.00		✓		Jembatan Penghubung antara Gampong Blang Dhot dengan Gampong Blang Bungong saat ini dalam kondisi kurang layak untuk dilalui sehingga butuh pembangunan jembatan yang baru guna mempermudah akses masyarakat kedua gampong dalam berbagai hal termasuk hal sosial dan peningkatan ekonomi masyarakat	✓		
5	Pembangunan Jalan Usaha Tani Krueng Teungoh dari Pulo Mesjid II ke Pulo Kawa	Pulo Sejahtera	2500	Km	Rp 500,000,000.00		✓		Normalisasi Krueng Teungoh, kendala saat ini sungai tersebut belum memiliki tebing sehingga ketika musim penghujan tiba air meluap ke sawah warga sehingga sebagian warga gagal panen karena tertimbun lumpur dan bebatuan akibat luapan air.	✓		
6	Pembangunan Pagar Lapangan Sepakbola	Layan			Rp 900,000,000.00		✓		Pembangunan Pagar Lapangan Sepak Bola, kondisi saat ini lapangan sepak bola tidak memiliki pagar sehingga ketika musim panen padi tiba banyak hewan ternak yang masuk ke area lapangan tersebut sehingga menyebabkan permukaan lapangan berlobang.			

Keterangan Pantau:

AK

= Konstruksi

Ab

= Pengadaan Barang

Ap

= Pelatihan

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN TANGSE KAB. PIDIE
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN TANGSE						2.715.775.234,00							2.826.347.662,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.715.775.234,00							2.826.347.662,00	
	7.01	KECAMATAN						2.715.775.234,00							2.826.347.662,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Lancarnya Kebutuhan Operasional Perkantoran	83 %			83 %	2.650.793.292,00						83 %	2.758.186.262,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	8 Laporan			2 Laporan	9.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel serta peningkatan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan syariat Islam	Aparatur	2 Laporan	9.000.000,00	KECAMATAN TANGSE
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	4.500.000,00	Kab. Pidie, Tangse, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel serta peningkatan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan syariat Islam	Aparatur		4.500.000,00	KECAMATAN TANGSE
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	4.500.000,00	Kab. Pidie, Tangse, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel serta peningkatan pelaksanaan syariat Islam	Aparatur		4.500.000,00	KECAMATAN TANGSE
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/Bulan			31 Orang/Bulan	2.403.964.875,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel serta peningkatan pelaksanaan syariat Islam	Aparatur	31 Orang/Bulan	2.476.083.821,00	KECAMATAN TANGSE
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	2.403.964.875,00	Kab. Pidie, Tangse, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel serta peningkatan pelaksanaan syariat Islam	Aparatur		2.476.083.821,00	KECAMATAN TANGSE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	12 Orang			3 Orang	16.293.302,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel serta peningkatan pelaksanaan syariat Islam	Aparatur	3 Orang	16.782.101,00	KECAMATAN TANGSE
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	16.293.302,00	Kab. Pidie, Tangse, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel serta peningkatan pelaksanaan syariat Islam	Aparatur		16.782.101,00	KECAMATAN TANGSE
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	20 Laporan			5 Laporan	75.103.888,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel serta peningkatan pelaksanaan syariat Islam	Aparatur	5 Laporan	92.996.178,00	KECAMATAN TANGSE
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.060.000,00	Kab. Pidie, Tangse, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel serta peningkatan pelaksanaan pelayanan syariat Islam	Aparatur		2.121.800,00	KECAMATAN TANGSE
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2.170.030,00	Kab. Pidie, Tangse, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel serta peningkatan pelaksanaan pelayanan syariat Islam	Aparatur		2.235.103,00	KECAMATAN TANGSE
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	19.652.143,00	Kab. Pidie, Tangse, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel serta peningkatan pelaksanaan pelayanan syariat Islam	Aparatur		24.071.412,00	KECAMATAN TANGSE
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	22.350.003,00	Kab. Pidie, Tangse, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel serta peningkatan pelaksanaan pelayanan syariat Islam	Aparatur		23.500.000,00	KECAMATAN TANGSE
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	28.871.712,00	Kab. Pidie, Tangse, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel serta peningkatan pelaksanaan pelayanan syariat Islam	Aparatur		41.067.863,00	KECAMATAN TANGSE
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	12 Laporan			3 Laporan	96.431.227,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel serta peningkatan pelaksanaan pelayanan syariat Islam	Aparatur dan Masyarakat	3 Laporan	99.324.162,00	KECAMATAN TANGSE
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	8.416.006,00	Kab. Pidie, Tangse, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel serta peningkatan pelaksanaan pelaksanaan syariat Islam	Aparatur dan Masyarakat		8.668.486,00	KECAMATAN TANGSE
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	4.472.693,00	Kab. Pidie, Tangse, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel serta peningkatan pelaksanaan pelaksanaan syariat Islam	Aparatur dan Masyarakat		4.606.873,00	KECAMATAN TANGSE
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	83.542.528,00	Kab. Pidie, Tangse, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel serta peningkatan pelaksanaan pelaksanaan syariat Islam	Aparatur dan Masyarakat		86.048.803,00	KECAMATAN TANGSE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Peliharaan</i>	4 Unit			4 Unit	50.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel serta peningkatan pelaksanaan syariat Islam	Aparatur	4 Unit	64.000.000,00	KECAMATAN TANGSE
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				3 Unit	20.000.000,00	Kab. Pidie, Tangse, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel serta peningkatan pelaksanaan syariat Islam	Aparatur		24.000.000,00	KECAMATAN TANGSE
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	30.000.000,00	Kab. Pidie, Tangse, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel serta peningkatan pelaksanaan syariat Islam	Aparatur		40.000.000,00	KECAMATAN TANGSE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Cakupan Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</i>	83 %			83 %	38.299.000,00						83 %	40.327.970,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	4 Laporan			1 Laporan	4.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel serta peningkatan pelaksanaan pelayanan syariat Islam	Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN TANGSE
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>				1 Laporan	4.000.000,00	Kab. Pidie, Tangse, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel serta peningkatan pelaksanaan pelayanan syariat Islam	Aparatur dan Masyarakat		5.000.000,00	KECAMATAN TANGSE
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Jumlah Urusan yang di Limpahkan Kepada Kecamatan</i>	28 Urusan			7 Urusan	34.299.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel serta peningkatan pelaksanaan pelayanan syariat Islam	Aparatur dan Masyarakat	7 Urusan	35.327.970,00	KECAMATAN TANGSE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	15.450.000,00	Kab. Pidie, Tangse, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel serta peningkatan pelaksanaan syariat Islam	Aparatur dan Masyarakat		15.913.500,00	KECAMATAN TANGSE
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6 Laporan	18.849.000,00	Kab. Pidie, Tangse, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel serta peningkatan pelaksanaan syariat Islam	Aparatur dan Masyarakat		19.414.470,00	KECAMATAN TANGSE
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum	77 %			77 %	2.523.500,00						77 %	2.599.205,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-			1 Laporan	2.523.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel serta peningkatan pelaksanaan syariat Islam	Aparatur dan Masyarakat	-	2.599.205,00	KECAMATAN TANGSE
	7.01.04.7.03.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	2.523.500,00	Kab. Pidie, Tangse, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel serta peningkatan pelaksanaan syariat Islam	Aparatur dan Masyarakat		2.599.205,00	KECAMATAN TANGSE
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih	83 %			83 %	5.000.000,00						83 %	5.500.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Keagamaa,adat istiadat dan hari besar nasional	4 Laporan			1 Laporan	5.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel serta peningkatan pelaksanaan syariat Islam	Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	5.500.000,00	KECAMATAN TANGSE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				28 Orang	5.000.000,00	Kab. Pidie, Tangse, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel serta peningkatan pelaksanaan syariat Islam	Aparatur dan Masyarakat		5.500.000,00	KECAMATAN TANGSE
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Realisasi pengelolaan dana desa	93 %			93 %	19.159.442,00						93 %	19.734.225,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yan di Bina	28 Desa			28 Desa	19.159.442,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel serta peningkatan pelaksanaan syariat Islam	Masyarakat	28 Desa	19.734.225,00	KECAMATAN TANGSE
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	19.159.442,00	Kab. Pidie, Tangse, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel serta peningkatan pelaksanaan syariat Islam	Masyarakat		19.734.225,00	KECAMATAN TANGSE
	JUMLAH							2.715.775.234,00							2.826.347.662,00	